

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan relasi berkesinambungan antar negara yang saling berkomunikasi dan menjalin hubungan satu sama lain yang di upayakan aktor sebuah negara atau aktor yang bukan berasal dari negara atau non-negara.

Hubungan Internasional menjelaskan fenomena interaksi lintas batas negara menggandeng asas kepentingan nasional untuk berpentas di panggung politik internasional berdasarkan kebijakan negaranya itu sendiri.

Pada buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. dipaparkan yang isinya:

"Studi mengenai Hubungan Internasional sering di terjemahkan sebagai suatu studi mengenai interaksi 2 arah yang timbal balik antara badan yang melewati batas-batas negara. Awal mula terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk keharusan akan sebuah akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah rumit dan anarkisnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi sangat sulit untuk memungkinkan adanya sebuah negara yang memiliki kedaulatan menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Kusumohamidjojo, dalam Sitepu menjelaskan bahwa hubungan internasional memiliki makna yang secara literal kita dapat artikan menjadi suatu hubungan antar bangsa dan negara mencakup nilai (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) dari semua aspek tersebut bisa di katakan yang merupakan aspek dominan adalah politik dan hukum. Aspek politik yang material (kepentingan militer, ekonomi, dan kebudayaan sedangkan aspek hukumnya menjadi aspek

formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian procedural dari berbagai kepentingan (*interest*) (Sitepu, 2011:20).

Hubungan Internasional muncul ketika adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia, yang kemudian negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi sebuah sistem global (Jackson & Sorensen, 2009: 2)

Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, maka dikembangkan studi Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non negara; dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional (Mas'ood, 2012: 31-32).

J.David Singer dalam bukunya “*The Behavioral Science Approach to Interational Relations*” mengartikan Hubungan Internasional sebagai sekumpulan generalisasi empiris yang secara internal konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan), dan *explanatory* (menjelaskan) (Coulombis dan Wolfe, 2004: 40).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun nonpemerintah. Holsti berpendapat bahwa Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan

meliputi mencakupi bagian analisa kebijakan dalam dan luar negeri ataupun langkah politik antar bangsa, namun dengan menunjukkan keseluruhan segi hubungan itu (Holsti, 2006: 29).

Studi Hubungan Internasional dinyatakan oleh McClelland dalam Perwita dan Yani merupakan suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumber daya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (Perwita & Yani, 2005: 4).

2.1.2 Politik Internasional

Dalam setiap interaksi yang terjadi dalam lingkungan internasional pastikan melibatkan negara lain. Setiap negara akan memperjuangkan politik luar negerinya tersebut dalam interaksinya dengan negara lain yang terlibat didalamnya. Pertemuan politik luar negeri masing-masing negara tersebut disebut dengan politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam Hubungan Internasional. Interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional antar negara merupakan salah satu wujud politik internasional. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

"Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan atau konflik" (Perwita dan Yani, 2005: 40).

Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik

internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi (Perwita dan Yani, 2005: 40).

Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Formulasi dari pola aksi-reaksi ini member kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris (Perwita dan Yani, 2005: 42).

2.1.3 Keamanan Internasional

Dalam dunia internasional, keamanan memiliki posisi yang sangat penting dan bilamana keamanan nasional terganggu maka akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan internasional karena akan berpengaruh terhadap negara sekitarnya. Menurut Barry Buzan, keamanan dalam arti objektif mengukur adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dalam arti subjektif, tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Buzan, 2008 : 2, 4, 12).

Keamanan dalam hubungan internasional mengalami pergeseran dari konsep tradisional yang mengutamakan masalah perang dan damai menjadi konsep modern yang lebih mengutamakan *human security* (keamanan manusia) dan aspek-aspek lainnya, sehingga tidak memfokuskan pada hubungan antar negara tetapi juga keamanan pada masyarakatnya. Fokus utama dari perang berubah menjadi individu. Keamanan internasional terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB dalam menjamin kelangsungan hidup dan keamanan bersama. Konsep keamanan terus berkembang selama bertahun-tahun hingga saat ini

cakupannya mulai dari tipe tradisional yaitu konvensional kekuatan militer, sebab dan akibat perang, kekuatan ekonomi, konflik etnis, agama dan ideologi, konflik perdagangan dan ekonomi, pasokan energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, makanan serta ancaman terhadap keamanan manusia dan stabilitas negara dari degradasi lingkungan, penyakit menular, perubahan iklim, dan kegiatan para aktor non-negara (Buzan, 2008 : 8).

Selama periode perang dingin, literatur mengenai keamanan didominasi gagasan mengenai keamanan nasional yang sebagian besar diartikan secara militeristik. Berdasarkan sudut pandang tersebut, keamanan nasional yang diukur dari kepemilikan kapabilitas militer suatu negara menjadi prioritas paling pertama. Gagasan mengenai keamanan berpusat pada negara sehingga mengutamakan keamanan nasional dan sempit karena terfokus pada aspek militer dari keamanan nasional. Kritik datang dari beberapa pihak, seperti halnya pemaparan bahwa keamanan seharusnya mencakup lima aspek, yaitu keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan militer sehingga fokus utama dapat dialihkan kepada keamanan secara internasional (Buzan, 2008 : 10).

2.1.4 Keamanan Dan Ancaman

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca-Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi juga soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai

urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan campur tangan dengan negara lain dalam cara mengatasinya (Perwita & Yani, 2005: 119).

Dalam buku Transformasi Dalam Studi Hubungan internasional, pengertian keamanan yang dikemukakan oleh Walter Lippmann yaitu:

“Bangsa akan aman sejauh mana tidak membahayakan nilai-nilai inti jika ingin menghindari perang, dan mampu bila ditantang, untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dengan perang.” (Hermawan, 2007: 28).

Keamanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional. Makna keamanan (*security*) bukan sekedar kondisi aman tenang tetapi keselamatannya atau kelangsungan hidup bangsa dan negara. Didalam konsep ini, terdapat tiga kepentingan inti yang secara mendasar dapat mendapat ancaman dari luar, yaitu:

1. Pertama, adalah *Physical Security* atau keamanan fisik dari masyarakat suatu negara dan hak milik pribadi mereka.
2. Kedua adalah *Rules and institution* yang dilaksanakan suatu masyarakat negara, khususnya konstitusi dan aturan formal lainnya.
3. Ketiga adalah *prosperity* yaitu sumber modal, barang mentah sistem keuangan dan lain lain (Rudi, 2002: 64-65).

Dari teori yang telah dijelaskan diatas dipahami bahwa setiap negara pasti akan menghindari perang, namun bilamana tidak dapat dihindari maka setiap negara harus bersiap untuk perang untuk menjamin keamanan negaranya. Fokus keamanan dengan demikian terletak pada kapabilitas suatu negara, tidak heran bila kemudian setiap negara-negara akan memperkuat kemampuan pertahanannya untuk menjamin keamanan negaranya masing-masing. Itulah pentingnya pertahanan suatu negara khususnya diperbatasan, bilamana ada hal yang mengancam eksistensi suatu negara maka negara tersebut dapat menangkalnya

dengan kekuatan yang dia punya. Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaya untuk meredam keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar (Rudi, 2002: 31).

Macam ancaman dari berbagai sektor menurut T. May Rudi dalam bukunya Studi Strategis: Dalam transformasi Sistem Internasional pasca perang Dingin:

1. Militer

Ancaman militer telah menjadi hantu yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur, namun pula unsur-unsur ekosistem serta unsur-unsur kehidupan sosial politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman militer sampai saat ini masih merupakan prioritas setiap negara, mengingat tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah diraih rakyatnya dalam bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktifitas yang telah ditekuni, musnah karena peperangan.

2. Politik

Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau menciptakan intrik politik yang mampu mengganggu jalannya pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya. Ancaman politik boleh jadi merupakan ancaman umum yang terdapat di semua bangsa-bangsa didunia, tanpa melihat besar atau kecilnya baik negara maupun kekuatan yang dimilikinya.

3. Sosial

Perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat terjadi di sebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik, atau dapat pula dari perbedaan kultur. Kendala utama yang dihadapi dalam menghadapi ancaman sosial adalah, bahwasannya ancaman tersebut biasanya datang dari dalam negeri sendiri.

4. Ekonomi

Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Negara dalam hal ini hanyalah salah satu aktor yang berperan dalam perekonomian dunia. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Jika negara tersebut tidak mampu segera bangkit dari aspek struktural tersebut, maka keruntuhan sebuah negara tinggal menunggu waktu.

5. Ekologi

Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Secara tradisonal, ancaman ekologi dapat dilihat sebagai ketidak sengajaan, bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok persoalan bagi agenda keamanan nasional (Rudi, 2002: 33-35).

Ancaman terhadap suatu bangsa atau negara bisa datang dari dalam maupun luar, namun biasanya lebih banyak datang dari lingkungan luar.

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

“Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional” (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu:

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002 : 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
 2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional.
- Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.

3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintah sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008 : 67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep “*power*” kepentingan “*interest*” didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu “*power*” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama

halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan:

“Kemampuan yang paling minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kulturalnya yang melalui gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik” (Coulumbis & Walfe, 2004 : 115).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama. (Sitepu, 2011 : 165).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah “*relation*” (Goldstein dan Pevehouse, 2010 : 71).

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu, kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak

berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008 : 67-69). Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang nyata wujudnya dan dapat diukur):
 - a. Populasi (jumlah penduduk);

- b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik);
- c. Sumber alam dan kapasitas industri;
- d. Kapasitas Produksi pertanian;
- e. Kekuatan dan mobilitas militer.

2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur):

- a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*);
- b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi;
- c. Tipe dan gaya pemerintahan;
- d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*);
- e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan;
- f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002 : 114).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia.

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan

tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis) dan mudah berubah guna disesuaikan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002 : 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.

3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 110).

2.1.6 Migrasi Internasional

Migrasi internasional didefinisikan sebagai suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya (Zlotnik, 1992, dalam Haris 2002 : 3).

Konsep *Push and Pull* dalam Migrasi menurut Everett S.Lee

Push Factor (Faktor Pendorong). Merupakan faktor penyebab migrasi yang berasal dari daerah semula atau daerah asal. Diantaranya adalah :

1. Semakin berkurangnya sumber daya alam di daerah asal
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal
3. Alasan pendidikan, pekerjaan dan perkawinan
4. Bencana alam, seperti banjir, longsor, dan gunung meletus
5. Adanya tekanan - tekanan politik, agama dan suku

Pull Factor (Faktor Penarik). Merupakan faktor yang berasal dari daerah tujuan migrasi. Diantaranya adalah :

1. Adanya harapan untuk memperbaiki kehidupan di daerah tujuan

2. Adanya fasilitas pendidikan yang lebih baik
3. Lingkungan tempat tinggal yang lebih baik
4. Ramai akan sarana hiburan, seperti Mall, bioskop dan taman bermain, yang hanya tersedia di kota - kota besar.

Migrasi internasional merupakan suatu pilihan rasional individu akan konsekuensi dari adanya perbedaan upah dan kondisi pekerjaan di antara negara-negara pengirim dan penerima migran. Migrasi internasional di sisi lain menjelaskan migrasi sebagai suatu keputusan logis suatu keluarga atau rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalisasi resiko terhadap pendapatan keluarga. Sehingga menurut teori ini, bahkan jika tidak adanya perbedaan level upah, migrasi internasional akan tetap terjadi sebagai bentuk diversifikasi sumber pendapatan keluarga. Beberapa teori lain yang juga menjelaskan fenomena migrasi internasional adalah teori system dunia (*world system theory*) dan pendekatan struktur historis (*historical-structural approach*) yang menjabarkan migrasi sebagai konsekuensi natural dari globalisasi ekonomi dan ekspansi hubungan ekonomi kapitalis, serta migrasi sebagai suatu alat untuk memobilisasi tenaga kerja murah untuk kapital. (Lee dalam Wahyuni, dkk 2012:2).

Beranjak dari pendekatan teoritis akan migrasi internasional, Di mana dalam konteks ini, migrasi internasional dilakukan oleh para imigran bukan secara sukarela namun terpaksa (*forced migration*). Dalam pengartikulasian yang lain, migrasi ini juga dikatakan sebagai migrasi ireguler dan sangat erat kaitannya dengan keamanan negara dan manusia, terutama di negara penerima. (Lee dalam Wahyuni dkk 2012:3).

Koser menyatakan bahwa migrasi yang ireguler menimbulkan dilema baik bagi negara-negara, juga bagi para migran sendiri di mana mereka terpapar resiko insecurities dan kerentanan. Penanganan pengungsi dan migran ireguler merupakan suatu isu yang banyak diperdebatkan, mengingat terdapat banyak kasus di mana negara penerima dianggap gagal

dalam mengontrol permasalahan ini dianggap menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan. (Koser, 2007 : 54).

Koser menekankan pula pembahasan migrasi ireguler dan keamanan negara pada tarik menariknya konsep hak negara untuk mengontrol perbatasannya demi menjaga kedaulatan dengan hak prerogatif negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara penerima kerap dihadapkan oleh tuntutan kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk menerapkan kebijakan pintu terbuka terhadap para pengungsi dan migran pada umumnya, namun ada kontra versus atau resiko permasalahan penerimaan yang kerap menciptakan bentrokan sosial dengan masyarakat. (Koser, 2007 : 56).

Adapun kebijakan imigran terutama untuk mengontrol migrasi ireguler sudah berkembang sejak pertengahan 1990an, dan kebijakan yang semakin ketat dan tertutup banyak diambil oleh negara-negara penerima imigran khususnya Amerika Serikat, setelah terjadinya tragedi besar seperti 11 September 2001 yang menimpa AS. Ini juga berpengaruh pula pada kesigapan *border* lain termasuk di perbatasan dengan Meksiko dengan di ratifikasinya *Executive order* 13767. Tipologi pendekatan kebijakan negara penerima dapat dilihat dari beberapa tahapan migrasi yakni pengaturan pra-kedatangan, pengaturan perbatasan, dan pengaturan setelah kedatangan. (Koser, 2007:60).

Migrasi Internasional dari Meksiko ke AS pada masa sekarang merupakan salah satu dimensi globalisasi yang terus meningkat dan turut memberi pengaruh dalam struktur sosial dan ekonomi. Perkembangan pembangunan demografi, perbedaan demokrasi yang menciptakan kekuatan insetivitas seperti halnya krisis global yang mempengaruhi bagian besar perkembangan dunia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah *nation-state actor* dan *non-state actor* (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk

interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara (Darmayadi, dkk. 2015: 44-45).

Menurut Plano dalam Perwita dan Yani, setiap negara tentu memiliki tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai, untuk itu setiap negara melakukan banyak upaya demi mencapainya. Konsep kepentingan nasional perlu dimengerti agar kita dapat memahami perilaku internasional. Para ahli mengemukakan bahwa “negara bertindak atas kepentingan nasionalnya” hal ini karena kepentingan nasional merupakan formula kebijakan suatu negara yang berpengaruh terhadap negara lain. Kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2014: 35).

Dalam National Security Strategy of the United States of America tahun 2017, tepatnya pada pilar yang pertama memaparkan kepentingan nasional Amerika Serikat diperbatasan yakni Amerika Serikat harus dan akan membangun kembali hal-hal terkait kontrol perbatasan, ini merupakan langkah pertama menuju keamanan melindungi tanah air Amerika dan memperkuat kedaulatan Amerika. AS harus mengurangi narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*), imigran ilegal, dan melindungi infrastruktur penting negara Amerika Serikat. AS harus mencegah, mengganggu, dan mengalahkan potensi ancaman sebelum mereka mencapai Amerika Serikat, Atauapun mengambil langkah-langkah untuk merespons dengan cepat untuk bertemu kebutuhan rakyat. AS harus membangun budaya kesiapan dan ketahanan di seluruh fungsi pemerintah, infrastruktur kritis, sistem ekonomi dan politik.

(<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>)

Kepentingan nasional Amerika Serikat, dalam bidang keamanan antara lain, pertama, untuk melindungi kepentingan vital dan mengamankan perdamaian, mencegah agresi, mencegah, meredakan, dan mengelola krisis, menghentikan proliferasi senjata pemusnah dan

memajukan kontrol dan pelucutan senjata, yang kedua ialah untuk menjaga kestabilan lokal dan regional yang tidak mengancam keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat salah satu faktornya merupakan imigran ilegal. (<https://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/18996.html> diakses pada 23 mei 2020).

Ini mengacu pada Amerika Serikat dengan benang merah kepentingan atas imigran ilegal Meksiko melalui pembuatan tembok keamanan di perbatasannya dengan negara tetangganya tersebut.

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Meksiko terjalin dari waktu yang cukup lama dan tentunya terjadi banyak konflik dalam perjalannya, seperti konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Meksiko dari tahun 1846 hingga tahun 1848. Perang ini diakibatkan oleh sengketa wilayah. Selain melancarkan blokade laut, tentara Amerika Serikat menyerang dan menaklukan New Mexico, California, dan sebagian Meksiko utara. Tentara AS juga menguasai Ciudad de Mexico dan memaksa Meksiko agar setuju menjual wilayah-wilayah utaranya kepada Amerika Serikat. Maka ditandatangani Perjanjian Guadalupe Hidalgo yang mengakhiri perang pada tahun 1848. Perjanjian itu memaksa Meksiko menyerahkan California, Nevada, Utah, New Mexico, sebagian besar Arizona dan Colorado, dan sebagian Texas, Oklahoma, Kansas, dan Wyoming, kepada Amerika Serikat. (Diakses melalui <https://wawasansejarah.com/perang-meksiko-amerika/> 17 Juni 2020)

Sejarah imigrasi Meksiko ke Amerika Serikat sendiri apabila ditarik benang secara historis bermula sebagai gerakan buruh kasar dan tidak terampil yang didorong ke utara sebagian besar karena kemiskinan dan pengangguran dan ditarik ke pasar tenaga kerja Amerika dengan upah lebih tinggi. Realitanya, sebagian besar orang Meksiko adalah imigran ekonomi yang berusaha memperbaiki kehidupan mereka. Pada saat terjadi pertikaian sipil, seperti Revolusi Meksiko (1910-1917) dan Pemberontakan Cristero (1926–1929), banyak yang melarikan diri ke Amerika Serikat untuk menghindari penganiayaan agama dan politik. Yang

lain, tergesa-gesa di bawah tekanan masyarakat agraris pedesaan yang konservatif, patriarkal, terikat tradisi, mereka telah bermigrasi mencari nilai-nilai modern dan kebebasan pribadi tentunya dengan sebuah motif akan kenyamanan lebih besar dari tanah airnya. (<http://www.seratusinstitute.com/news/detail/sejarah/18/sejarah-tanggal-24-mei.html> Diakses pada 17 Juni 2020)

Dalam hubungan internasional, interaksi antar negara tidak hanya melalui kerja sama, pada kenyataannya, dalam mencapai tujuan nasional masing-masing negara, adakalanya muncul konflik yang tidak dapat terelakkan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan serta perbedaan nilai yang dianut. Perbedaan kepentingan atau kepentingan nasional setiap negara tentu berbeda dan seringkali berbenturan dalam prakteknya. Dibawah kepemimpinan Donald Trump, beberapa hal-hal kontroversial dilakukan Trump terkait Imigran gelap dari Meksiko, Ia berhasil mewujudkan salah satu janji kampanye Presiden Amerika Serikat yang membangun tembok melalui kebijakan *Executive order* dalam mengefisienkan keamanan nasional dari arus Imigran gelap khususnya dari Meksiko.

Pasca pengesahannya, akibat dari keputusan pembuatan *border* muncul, memicu terjadinya ketidakstabilan terhadap hubungan antara kedua negara karena ada klaim sepihak melalui politik-politik internasional bahwasanya dalam proyek pembangunan tembok Meksiko yang akan andil dalam pendanaan finansial karena dianggap sebagai penyebab masalah Imigran Ilegal dari awal.

Untuk itu, peneliti tertarik meneliti kepentingan Amerika Serikat dengan kebijakan *Executive order 13767* dibawah kepemimpinan Donald Trump dalam perbatasan dengan Meksiko terkait Imigran Ilegal yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. bahkan tindakan-tindakan kontroversial ditempuh Amerika Serikat dalam menjaga keamanannya.

Lalu dalam merespon imigrasi ilegal dan kebijakan donald trump akan tembok perbatasan, Mayoritas dari warga negara Amerika dengan persentase 58% menentang

perluasan tembok secara substansial di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, sementara 40% mendukungnya, menurut survei Januari 2019 oleh *Center*. Sedangkan respon sikap berbeda dilihat melalui 2 partai besar Amerika ini. Sekitar delapan per sepuluh perwakilan Partai Republik dan independen Partai Republik sebanyak 82% mendukung perluasan tembok, sementara bagian Demokrat dan Demokrat yang lebih besar dengan 93% menentanginya. (<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/16/how-americans-see-illegal-immigration-the-border-wall-and-political-compromise/> Diakses pada 24 Mei 2020)

Berikut kerangka pemikiran yang penulis sajikan yang diharapkan dapat memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh atas penelitian kali ini:

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran



